



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021**

**Sarilamak, Agustus 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah mau pun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan selesainya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial dapat mempedomani Renja ini sehingga tujuan dan sasaran yang kita harapkan dalam pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk satu tahun kedepan dapat dicapai.

Terakhir kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan perbaikan- perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Renja ini dimasa yang akan datang, terima kasih.

Payakumbuh, Agustus 2020

The image shows a purple circular official stamp of the Social Service of Lima Puluh Kota Regency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA' around the perimeter and 'DINAS SOSIAL' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'HARMEN, SH' and the NIP number 'NIP. 19670816 199308 1 001' are printed.

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**HARMEN, SH**  
NIP. 19670816 199308 1 001



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**PELAKSANAAN**

**Pasal 5**

- ( 1 ) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- ( 3 ) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja PD.

**Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.



**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

- ( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- ( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd

**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2020 NOMOR 60



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>PERBUP NOMOR 60 TAHUN 2020</b>		
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iii
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang.....	I-1
	1.2 Landasan Hukum.....	I-5
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-8
	1.4 Sistematika Penulisan.....	I-8
<b>BAB II</b>	<b>: HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU</b>	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial	II-10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	II-15
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	II-20
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-29
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-36
<b>BAB III</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-38
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial	III-39
	3.3 Program dan Kegiatan	III-42
<b>BAB IV</b>	<b>: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL</b>	IV-46
	4.1 Rencana Kerja Dinas Sosial	IV-46
	4.2 Pendanaan	IV-49
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	V-78

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-8
Tabel II.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-17
Tabel II.3	: Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial.....	II-20
Tabel 2.3.1	: Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-23
Tabel 2.3.2	: SWOT Analisa Internal dan Eksternal .....	II-26
Tabel 2.3.3	: Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT.....	II-27
Tabel II.4	: Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-31
Tabel II.5	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-37
Tabel 3.3.1	: Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial.....	III-43
Tabel 3.3.2	: Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Sosial.....	III-43
Tabel 4.1	: Rencana Target Kinerja IKU KD/ IKU OPD .....	IV-46
Tabel 4.2	: Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021.....	IV-47
Tabel	: Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota .....	IV-50
Tabel	: Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.....	IV-59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada RKPD tersebut.

Renja Dinas Sosial Tahun 2021 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Renja Dinas Sosial menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya.

Penyusunan Renja Dinas sosial mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2021, Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

I. Persiapan Penyusunan;

Meliputi Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan struktur organisasi tim penyusunan Rencana Kerja ( RENJA) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, Orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan Persiapan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019

II. Penyusunan Rancangan Awal;

Berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021, hasil evaluasi Renja Dinas Sosial tahun 2019 (n-2) dan Perkiraan capaian tahun 2020 (n-1).sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja perangkat daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Sosial Tahun 2021, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2019. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja Tahun lalu dan Tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga

rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil Perangkat Daerah Tahun lalu.

### III. Penyusunan Rancangan;

Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu ke 3 bulan Maret 2020.

### IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;

Sesuai dengan Pemendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa forum perangkat daerah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Namun berdasarkan kesepakatan Bapelitbang dengan OPD untuk mencapai efisiensi dan efektivitas maka forum Perangkat Daerah dilaksanakan secara gabungan pada forum gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum gabungan Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditanda tangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum gabungan Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

### V. Perumusan Rancangan Akhir;

Rancangan akhir renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD, sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

## VI. Penetapan.

Pada tahapan rancangan akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2021 di sampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat 1 minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi disempurnakan kembali oleh Dinas Sosial Rancangan Akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi public merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan Perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan di bidang sosial yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Sosial.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Sosial ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Sosial.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun 2021.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2021 ini terdiri dari beberapa BAB sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Sosial, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan penyusunan dan sistematika penulisan
- II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, analisis kinerja pelayan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Sosial, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, program dan kegiatan tahun 2021.
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Berisikan Rencana kerja dan pendaan Dinas Sosial Tahun 2021
- V. Penutup berisikan ketentuan penutup.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu (tahun n-2) (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) (tahun 2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Dinas Sosial sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Sosial dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Sosial.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2020  
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
	<b>Wajib</b>													
	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP DINAS SOSIAL</b>													
01	06	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>									
01	06	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan yang dipenuhi kebutuhan surat menyurat	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
01	06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk pembayaran Telepon, Air, Listrik, Kawat/Faxsimili/Internet	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
01	06	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Bulan yang dipenuhi kewajiban pembayaran pajak dan perizinan kendaraan Roda 6, Roda 4 dan Roda 2	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
01	06	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
01	06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan yang dipenuhi kebutuhan alat kebersihan Kantor	5 Paket	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan yang dipenuhi kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
01	06	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan yang di Penuhi kebutuhan alat tulis kantor	5 Paket	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan yang dipenuhi cetak dan penggandaan.	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
01	06	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Bulan yang dipenuhi Alat Listriknya	5 Paket	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan yang dipenuhi Pembayaran langganan bahan bacaan, surat kabar dan majalah	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
01	06	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk penyediaan Makan dan Minum Rapat dan Tamu	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%

01	06	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
01	06	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>								
01	06	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 Paket	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	02	10	Pengadaan Mobiler	Jumlah Paket pengadaan Mobiler kantor	5 Paket	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan pelaksanaan jasa sopir dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%
01	06	01	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>							137	
01	06	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Stel pakaian dinas	290 stel	137	63	63	100%	0	200	69%
01	06	01	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>							16	
01	06	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP,PK,IKU,RKT, Renja, Penyusunan RKA 2020, Penyusunan RKA 2019, LKPD, LPPD dan EKPPD	40 dokumen	16	8	8	100%	8	32	80%
01	06	01	06	03	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	5 dokumen	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	06	06	Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah Bulan yang dipenuhi untuk Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	60 bulan	24	12	12	100%	12	48	80%

1	13				<b>URUSAN SOSIAL</b>													
01	06	01	15		<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya.</b>	<b>Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</b>												
01	06	01	15	02	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PSM, TKSK, Petugas dan Pendamping Sosial, honor (tali asih PSM,TKSK)	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%				
01	06	01	15	03	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya Pembentukan KUBE-FM Penumbuhan dan Pemberdayaan, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perkembangan Usaha KUBE-FM Yang Telah Tumbuh dan Berkembang	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%				
01	06	01	15	06	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya peningkatan keterampilan berusaha dan UEP bagi wanita KTK, dan WRSE	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%				
01	06	01	15	07	Kegiatan : Identifikasi, Pendataan dan Penguatan Kapasitas	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi data BDT, Terlaksananya Bimtek bagi PMKS untuk verifikasi BDT	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%				
01	06	01	01		<b>Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terhadap PMKS</b>												
01	06	01	16	01	Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Peny. Cacat dan Lansia.	Bantuan bagi Lansia terlantar dan lansia tidak potensial, pemberian UEP untuk lansia Produktif dan pemberian alat bantu untuk lansia	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%				
01	06	01	16	07	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Terlaksananya Peningkatan SDM bagi PSKS dan pemberdayaan masyarakat, terlaksanya bantuan RUTILAHU bagi PMKS.	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%				
01	06	01	16	08	Kegiatan : Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Vallidasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional dan verifikasi data PBIJKSS dan PBIJKN APBD	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%				
01	06	01	16	09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	pendistribusian Rastra dan terkoordinirnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%				



01	06	01	16	10	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggapan cepat darurat dan kejadian luar biasa	Pendistribusian bantuan tanggap darurat, terlaksananya peningkatan kemampuan anggota TAGANA, serta pembinaan terhadap daerah yang rawan konflik sosial	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	17		<b>Program Pembinaan Anak terlantar</b>	<b>Terwujudnya pembinaan terhadap anak terlantar</b>								
01	06	01	17	02	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Pelatihan bagi anak terlantar dan pengiriman anak terlantar kepanti PSBR Harapan Padang Panjang, Trimurni Padang Panjang dan Budi Utama Lubuk alung	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	17	05	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Bimbingan teknis bagi tenaga pembina anak terlantar.	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	18		<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	<b>Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>								
01	06	01	18	03	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma, Terlaksananya Pengiriman Penyandang Cacat ke Panti Sosial Rehabilitasi.	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	18	04	Kegiatan : Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Truma	Terlaksananya Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas Keliling dan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas.	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	19		<b>Program : Pembinaan Panti asuhan / Panti Jompo</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Terhadap Panti Asuhan/ Jompo</b>		-						
01	06	01	19	03	Kegiatan : Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan /jompo	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Panti	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	20		<b>Program : Pembinaan Eks penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>Terlaksananya pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial</b>								
01	06	01	20	01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Melalui Pelatihan Kewirausahaan Bagi EKS Penyandang Penyakit Sosial dan Pengiriman Eks Penyakit Psikotik ke Panti Sosial Rehabilitasi.	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%

01	06	01	21		<b>Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan terhadap kelembagaan kesejahteraan sosial</b>								
01	06	01	21	01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Terhadap Dunia Usaha/ Karang Taruna Nagari	5 kegiatan	2	1	-	0%	1	3	60%
01	06	01	21	04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terlaksananya pengembangan model kelembagaan jaminan sosial dan sosialisasi pelatihan pos daya	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%
01	06	01	21	11	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan kejuangan	Peringatan Hari Pahlawan 10 November	5 kegiatan	2	1	1	100%	1	4	80%

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : pada tahun 2019 program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja dan hasil kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan seperti :

Urusan wajib :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pada program dan kegiatan urusan wajib ini semuanya telah memenuhi target yang direncanakan dan di kategorikan sangat baik.

Pada kegiatan urusan sosial Realisasi Program dan Kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran, ada yang melebihi target kinerja hasil dan keluaran dan ada satu kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan seperti penjelasan di bawah ini :

Urusan sosial :

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya, pada program ini kegiatan (1) Peningkatan (capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS Lainnya pada kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran untuk PSKS (2) Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi keluarga Miskin, kegiatan ini telah memenuhi target hasil dan keluaran bagi kelompok KUBE (3) Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja Terlaksananya peningkatan keterampilan berusaha bagi wanita KTK, dan WRSE untuk kegiatan ini hendaknya di tambahkan target kinerja dan dana untuk pelatihan keterampilan bagi wanita KTK dan WRSE yang diberdayakan untuk meningkatkan IKU kepala daerah. (4) Kegiatan Identifikasi, Pendataan dan Penguatan Kapasitas kegiatan ini telah memenuhi target untuk pendataan Basis Data terpadu dan untuk pendataan PMKS belum bisa dilakukan karena tidak terakomodir dengan dana yang ada, hendaknya tahun berikutnya di akomodir untuk pandataan PMKS karena data PMKS ini sangat dibutuhkan untuk menghitung target IKU Kepala Daerah 5 (lima) tahun yang akan datang.

- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, pada program ini ada kegiatan (1) Pengembangan Kebijakan akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia , kegiatan ini target nya telah melebihi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, semua Lansia yang di targetkan di beri permakanan lansia sebanyak 2.676 orang dan terealisasi sebanyak 2.951 orang karena ada penambahan anggaran pada akhir tahun anggaran 2019. (2) Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS , kegiatan ini telah sesuai dengan target kinerja hasil dan keluaran. (3) Kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil dan keluaran. (4) Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya –upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial, kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil dan keluaran (5) Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa kegiatan ini telah memenuhi target capaian kinerja tapi untuk penyimpanan barang bantuan yang di berikan Pusat, provinsi atau masyarakat tidak ada dan tempat mobil rescue juga tidak ada, jadi diharapkan untuk tahun depan tempat gudang penyimpanan barang bantuan dan tempat mobil rescue sangat di perlukan yang direncanakan berlokasi di Jorong Pulutan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau.
- Program Pembinaan Anak terlantar, pada program ini kegiatan (1) Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar, (2) Peningkatan keterampilan tenaga pembina anak terlantar, pada program ini semua kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan.
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, pada program ini kegiatannya (1) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma dan (2) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma, pada program ini semua kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan.

- Program Pembinaan Panti asuhan / Panti Jompo, kegiatannya Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan.
- Program Pembinaan Eks penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. Kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan.
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial, Kegiatannya (1) Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha, (2) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial, (3) Pelestraian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial pada kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha, karena kegiatan ini dihilangkan oleh Tim pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sehingga target kinerja berkurang, jadi target pada tahun 2020 adalah 60 %.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria) dan SPM , maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. (IKK sama dengan IKD dalam RPJMD Bab VII).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan (Misalnya : data yang diluar Renstra dan di Luar RPJM tetapi dihasilkan oleh OPD dan terkait dengan Tupoksi OPD)

Jika perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator

kinerja pelayanan masing- masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial :

1. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
2. Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti dan anak terlantar di luar panti, indikator pencapaian Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar sosial di luar panti.
3. Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
4. Jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khusus nya gelandangan dan pengemis di luar panti, Indikator pencapaian jumlah warga negara atau gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
5. Jenis Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, Indikator Pencapaian Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, yang disesuaikan dengan format terlihat pada table II.2 berikut ini :

Tabel II.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	10		11	12	
1.	Jumlah Peningkatan SDM PSM dan TKSK			79 orang PSM 13	79 orang PSM 13	79 orang PSM 13	79 orang PSM 13	60 %	80 %	90 %	100 %	
2.	Jumlah Pembentukan Kube -FM Penumbuhan dan Pemberdayaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengembangan usaha Kube-FM			13 KUBE FM	13 KUBE FM	13 KUBE FM	13 KUBE FM	60 %	80 %	90 %	100 %	
3.	Jumlah Peningkatan Keterampilan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Wanita KTK dan WRSE			65 orang	38 orang	65 orang	65 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
4.	Jumlah Pelaksanaan Verivali Data BDT			13 Kecamatan 79 Nagari	13 Kecamatan 79 Nagari	13 Kecamatan 79 Nagari	13 Kecamatan 79 Nagari	60 %	80 %	90 %	100 %	
5.	Jumlah Bantua Permakanan Lansia terlantar, Lansia Tidak Potensial dan Bantuan UEP bagi Lansia Produktif	v		2.452 orang	2.616 orang	2.616 orang	2.616 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
6.	Jumlah Peningkatan SDM bagi PSKS			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60 %	80 %	90 %	100 %	
7.	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional			17.874 Data PBI JKSS dan 139.728 PBI JKN	17.874 Data PBI JKSS dan 140.066 PBI JKN	19.000 Data PBI JKSS dan 141.066 PBI JKN	19.000 Data PBI JKSS dan 141.066 PBI JKN	60 %	80 %	90 %	100 %	
8.	Jumlah Pendistribusian Rastra dan terkoordinirnya pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH)			4.377.954 Kg Rastra/8.086 KPM PKH	22.451 KPM Rastra, 18.371 KPM PKH	22.451 KPM Rastra, 18.271 KPM PKH	22.451 KPM Rastra, 18.171 KPM PKH	60 %	80 %	90 %	100 %	
9.	Jumlah Pendistribusian Bantuan Tanggap Darurat terlaksananya peninggatan kemampuan anggota Tagana serta Pembinaan terhadap Daerah yang rawan konflik sosial			13 kecamatan, 30 orang anggota Tagana 1 KSB 9 Forum	13 kecamatan, 20 orang anggota Tagana 1 KSB 9	13 kecamatan, 20 orang anggota Tagana 1 KSB 9 Forum	13 kecamatan, 20 orang anggota Tagana 1 KSB 9 Forum	60 %	80 %	90 %	100 %	
10.	Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti Pelatihan dan Pengiriman anak Terlantar			50 orang	30 orang	50 orang	50 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
11.	Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar Yang Mengikuti Bimtek			24 orang	18 orang	24 orang	24 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
12.	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Pengiriman ke panti Rehap			27 orang	16 Orang	25 orang	25 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
13.	Jumlah Anak Disabilitas Yang Mengikuti Bimtek dan Mendapat Bantuan			30 orang	50 orang	50 orang	50 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
14.	Jumlah Pemenihan Kebutuhan Sandang Bagi Anak asuh Dalam Panti			360 orang/9 panti	280 orang/9 panti	280 orang/9 panti	280 orang/9 panti	60 %	80 %	90 %	100 %	
15.	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan UEP			15 orang	15 orang	20 orang	20 orang	60 %	80 %	90 %	100 %	
16.	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Bimtek dan Menerima Bantuan UEP			79 Karang Taruna	79 Karang Taruna	79 Karang Taruna	79 Karang Taruna	40 %	60 %	80 %	80 %	
17.	Jumlah LKKS, LK3 dan Pelatihan Pos Daya			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60 %	80 %	90 %	100 %	
18.	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan 10 November			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60 %	80 %	90 %	100 %	

Analisa Indikator :

1. Jumlah Pembinaan Peningkatan SDM PSM dan TKSK : datanya tetap karena jumlah PSM 79 orang karena berasal dari 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan data TKSK sebanyak 13 orang karena berasal dari 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta Pemilihan Pilar- Pilar Berprestasi.
2. Jumlah Pembentukan KUBE -FM Penumbuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengembangan usaha KUBE-FM serta Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin.
3. Jumlah Peningkatan Keterampilan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Wanita KTK dan WRSE
4. Jumlah Pelaksanaan Verivali Data BDT dan Pendataan PMKS dan PSKS
5. Jumlah Bantua Permakanan Lansia terlantar, Lansia Tidak Potensial, Bantuan UEP bagi Lansia Produktif dan Pemberian bantuan alat bantu cacat bagi Lansia.
6. Jumlah Peningkatan SDM bagi PSKS dan Peningkatan Sarana Prasarana PMKS yaitu RTLH
7. Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional dan Verivali data PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD dan sosialisasi
8. Jumlah Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan (BSP) dan terkoordinirnya pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH)
9. Jumlah Pendistribusian Bantuan Tanggap Darurat terlaksananya peninggatan kemampuan anggota Tagana serta Pembinaan terhadap Daerah yang rawan konflik sosial
10. Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti Pelatihan dan Pengiriman anak Terlantar ke Panti
11. Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar Yang Mengikuti Bimtek
12. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Pengiriman ke panti Rehap
13. Jumlah Anak Disabilitas Yang Mengikuti Bimtek dan Mendapat Bantuan



14. Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap Panti Sosial yang ada diKabupaten Lima Puluh Kota
15. Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan UEP
16. Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Bimtek, mengikuti Lomba karang Taruna Kabupaten dan Menerima Bantuan UEP
17. Jumlah LKKS, LK3 ,Pelatihan Pos Daya dan Pemberian Bantuan
18. Jumlah Peringatan Hari Pahlawan 10 November dan Rehab Makam Pahlawan

Tabel II.3  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sosial

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri (%)	70 %	75 %	80 %	85 %	79.96 %	-	80 %	85 %	
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	95	95	95	95	95 %	-	95 %	95 %	
3.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akip	60	65	65	65	68.46	-	65	65	

Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial.

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri (%)
2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)
3. Nilai Akip Dinas Sosial

Capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 melebihi target yang direncanakan . Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri (%) target Tahun 2019 70 % hasilnya 79,96 karena penambahan jumlah target di kegiatan Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia yaitu pemukiman lansia. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%) target 95 % dan realisasi 95 %, dan Nilai Akip Dinas Sosial target awal 60 dan realisasi 68,46 nilai yang diberikan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial**

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap *stakeholdersnya*
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2020.

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah khususnya Provinsi. Mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah Provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan. Peran dan fungsi kementerian sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. Dalam rangka penerapan restrukturisasi kementerian sosial yang mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung prioritas pembangunan yang mendukung visi dan misi presiden selaku kepala pemerintahan, sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan. Faktor pendukung pelaksanaan program pemerintah Provinsi adalah :

1. Adanya dukungan dalam pendataan PMKS
2. Pengembangan sumberdaya capital untuk meningkatkan kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial
3. Adanya penerapan standar sosialisasi

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang sosial dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial. Data permasalahan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1  
Data Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar	Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap pencapaian program nasional /internasional. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dengan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis Yang “Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa.”** Adapun misi Kepala Daerah yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Misi ke-3 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kemiskinan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan PMKS
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial
4. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap lansia

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah : Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat

diketahui dan ditentukan faktor–faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor–faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT).

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau keduanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/kemampuan, atau keuntungan.

Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

**Peluang**, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **acaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

**Tabel 2.3.2**

**SWOT Analisa Internal dan Eksternal**

<b>KEKUATAN (Strengths)</b>		<b>KELEMAHAN (Weaknesses)</b>	
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	W1	Tenaga sosial yang profesional masih kurang
S2	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi	W2	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi
S3	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W3	Keterbatasan anggaran
		W4	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
		W4	Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan

<b>PELUANG (Opportunities)</b>		<b>ANCAMAN (Threats)</b>	
O1	Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi	T1	Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
O2	Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional	T2	Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan kerawanan bencana sosial
O3	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PMKS		



Tabel 2.3.3

**Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT**  
**(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**

<p><b>INTERNAL</b></p> <p><b>EKSTERNAL</b></p>	<p><b>KEKUATAN (Strengths)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan penyandang masalah sosial</li> <li>➤ Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur yang cukup tinggi</li> <li>➤ Fasilitas pendukung kerja cukup memadai</li> </ul>	<p><b>KELEMAHAN (Weaknesses)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tenaga sosial yang profesional masih kurang</li> <li>➤ Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas belum mencukupi</li> <li>➤ Keterbatasan anggaran</li> <li>➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang</li> <li>➤ Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif di nagari dan kecamatan</li> </ul>
	<p><b>PELUANG (Opportunities )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dukungan dari sumber-sumber kesejahteraan sosial cukup tinggi</li> <li>➤ Jaringan kerja lembaga pemerin-tah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional</li> <li>➤ Adanya kesempat-an untuk mening-katkan kualitas PMKS</li> </ul>	<p><b><u>STRATEGI S + O</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial</li> <li>➤ Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial</li> <li>➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>➤ Meningkatkan kesejahteraan PMKS</li> </ul>

<b>ANCAMAN (Threats)</b>	<b><u>STRATEGI S + T</u></b>	<b><u>STRATEGI W + T</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwa-wasan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> </ul>

**1. Strategi Kekuatan – Peluang ( S – O ) :**

- a. Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah sosial
- c. Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
- d. Meningkatkan kesejahteraan PMKS

**2. Strategi Kelemahan – Peluang ( W – O ) :**

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya dalam peningkatan pembinaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial
- b. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (*networking*).
- c. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PMKS

**3. Strategi Kekuatan – Ancaman ( S – T ) :**

- a. Menurunkan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana

**4. Strategi Kelemahan-Ancaman ( W – T ) :**

- a. Meningkatkan profesional aparaturnya guna meningkatkan kemandirian PMKS
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikarenakan anggaran OPD yang belum memadai dan belum adanya data PMKS yang valid.
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
4. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparaturnya di Dinas Sosial

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Sosial dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja Dinas Sosial tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja Dinas Sosial juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 7.415.675.524,35,-(Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Lima) dan setelah di analisa hasil kebutuhan menjadi Rp. 8.186.329.224,35 (Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Lima) Perbedaan rancangan awal dan setelah dianalisa sesuai dengan kebutuhan ada kegiatan yang dana nya kurang sehingga memerlukan dana tambahan di luar rancangan awal RKPD.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Sosial disajikan dalam Tabel II.4. berikut:

**Tabel II.4**  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020  
Kabupaten Lima Puluh Kota

SKPD: DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
01	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD</b>				1,169,588,000.35	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD</b>				1,269,588,000.35	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>782,588,000.00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>792,588,000.00</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 bulan	8,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	12 bulan	8,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	48,588,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	48,588,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	20,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinsos	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	20,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinsos	Jumlah Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	330,000,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinsos	Jumlah Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	340,000,000.00	Penambahan anggaran pada kolom analisa kebutuhan untuk Penambahan Gaji THL
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinsos	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	7,500,000.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinsos	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	7,500,000.00	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinsos	Jumlah perawatan dan perbaikan peralatan kerja	12 bulan	10,000,000.00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinsos	Jumlah perawatan dan perbaikan peralatan kerja	12 bulan	10,000,000.00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinsos	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	45,000,000.00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinsos	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	45,000,000.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	65,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	65,000,000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Dinsos	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik./penerangan kantor	12 bulan	11,500,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Dinsos	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik./penerangan kantor	12 bulan	11,500,000.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah pembayaran bahan bacaan, surat kabar dan majalah	12 bulan	7,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah pembayaran bahan bacaan, surat kabar dan majalah	12 bulan	7,000,000.00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinsos	Jumlah Penyediaan Makan dan minum Rapat dan tamu	12 bulan	55,000,000.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinsos	Jumlah Penyediaan Makan dan minum Rapat dan tamu	12 bulan	55,000,000.00	

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinsos	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	175,000,000.00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinsos	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	175,000,000.00	
<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>320,000,000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>410,000,000.35</b>	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinsos	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	Laptop, Komputer, Printer	100,000,000.00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinsos	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	Laptop, Komputer, Printer	165,000,000.00	Penambahan anggaran di analisa kebutuhan untuk penambahan pembelian peralatan gedung kantor karena bayak yang telah rusak
	Pengadaan Mobiler	Dinsos	Jumlah Pengadaan Mobiler	5 lemari arsip, 1 meja rapat	25,000,000.00	Pengadaan Mobiler	Dinsos	Jumlah Pengadaan Mobiler	5 lemari arsip, 1 meja rapat	25,000,000.00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinsos	Jumlah jasa sopir dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 kali	120,000,000.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinsos	Jumlah jasa sopir dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 kali	120,000,000.35	
	Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Dinsos	Jumlah Rehab Gedung Kantor	1 Paket	75,000,000.00	Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Dinsos	Jumlah Rehab Gedung Kantor	1 Paket	100,000,000.00	Penambahan anggaran di analisa kebutuhan untuk rehab gedung kantor karena gudang penyimpanan bantuan untuk korban bencana telah bocor ataupun dan sudah tidak layak pakai lagi
<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>35,000,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>35,000,000.00</b>	
	Pengadaan Khusus Hari -hari tertentu	Dinsos	Jumlah stel Pakai khusus hari-hari tertentu	70 Stel	35,000,000.00	Jumlah stel Pakai khusus hari-hari tertentu	Dinsos	Jumlah stel Pakai khusus hari-hari tertentu	70 Stel	35,000,000.00	
<b>04</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>32,000,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>32,000,000.00</b>	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan tentang capaian & realisasi kinerja, Pembuatan RENJA, LAKIP, Lap LKPJ, Lap Bulanan, Lap Evaluasi Tri Wulan Dinas.Monev kegiatan	12 dokumen dan 3 laporan	15,000,000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan tentang capaian & realisasi kinerja, Pembuatan RENJA, LAKIP, Lap LKPJ, Lap Bulanan, Lap Evaluasi Tri Wulan Dinas.Monev kegiatan	12 dokumen dan 3 laporan	15,000,000.00	

	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Sosial	Jumlah laporan prognosis realisasi laporan dan semester	2 dokumen/laporan	3,500,000.00	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Sosial	Jumlah laporan prognosis realisasi laporan dan semester	2 dokumen/laporan	3,500,000.00	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Sosial	Jumlah Pelaporan keuangan akhir tahun.	1 dokumen	3,500,000.00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Sosial	Jumlah Pelaporan keuangan akhir tahun.	1 dokumen	3,500,000.00	
	Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Dinas Sosial	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	dokumen	10,000,000.00	Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Dinas Sosial	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	12 bulan	10,000,000.00	
	<b>URUSAN SOSIAL</b>				<b>6,246,087,524.00</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>				<b>6,916,741,224.00</b>	
<b>05</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya.</b>		<b>Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</b>		<b>2,169,000,000.00</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya.</b>		<b>Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</b>		<b>2,219,000,000.00</b>	
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan SDM Petugas dan PSKS serta Pemilihan Pilar-Pilar Sosial Berprestasi	80 orang PSM dan 13 Orang TKSK	369,000,000.00	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PSM, TKSK, Petugas dan Pendamping Sosial, honor (tali asih PSM,TKSK)	80 orang PSM dan 13 Orang TKSK	369,000,000.00	
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk pengurus KUBE-FM, Penumbuhan KUBE-FM dan Pengembangan KUBE-FM serta Pemberian bantuan untuk KUBE-FM	2 Sosialisasi dan Bantuan UEP bagi KUBE FM 13 KUBE FM, 1 KUBE Pengembangan dan 16 UEP Fakir Miskin	850,000,000.00	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk pengurus KUBE-FM dan Penumbuhan KUBE-FM serta Pemberian bantuan untuk KUBE-FM	2 Sosialisasi dan Bantuan UEP bagi KUBE FM 13 KUBE FM, 1 KUBE Pengembangan dan 16 UEP Fakir Miskin	850,000,000.00	
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah WRSE dan KTK yang mengikuti Pelatihan Keterampilan dan bantuan UEP	25 KTK, 25 WRSE	550,000,000.00	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah WRSE dan KTK yang mengikuti Pelatihan Keterampilan dan bantuan UEP	25 KTK, 25 WRSE	550,000,000.00	
	Identifikasi, Pendataan dan Penguatan Kapasitas	Kab. Lima Puluh Kota	Verifikasi dan Validasi Data BDT dan BSP/BPNT serta Pendataan PMKS dan PSKS	13 Kecamatan	400,000,000.00	Kegiatan : Identifikasi, Pendataan dan Penguatan Kapasitas	Kab. Lima Puluh Kota	Verifikasi dan Validasi data BDT dan bimtek verivali BDT	13 Kecamatan	450,000,000.00	Penambahan anggaran di hasil analisa kebutuhan untuk penambahan kegiatan pendataan PMKS untuk 13 Kecamatan
<b>06</b>	<b>Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Terlaksananya Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terhadap PMKS</b>		<b>3,269,742,254.00</b>	<b>Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Terlaksananya Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terhadap PMKS</b>		<b>3,803,742,254.00</b>	
	Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Peny. Cacat dan Lansia.	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Pemberian Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial, Jumlah Bantuan UEP bagi Lansia Produktif /Potensial dan Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	2.437 orang lansia terlantar dan lansia tidak potensial (Permakanan Lansia), 30 orang UEP lansia dan 95 orang penerima alat bantu	2,358,690,674.00	Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Peny. Cacat dan Lansia.	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lansia yang menerima bantuan Permakanan, bantuan UEP dan alat bantu bagi lansia	2.437 orang lansia terlantar dan lansia tidak potensial (Permakanan Lansia), 30 orang UEP lansia dan 95 orang penerima alat bantu	2,358,690,674.00	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk PSKS dan pemberian bantuan RTLH	1 Sosialisasi dan 15 RTM	321,051,580.00	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk PSKS dan pemberian bantuan RTLH	1 Sosialisasi dan 15 RTM	335,051,580.00	Penambahan anggaran di hasil analisa kebutuhan untuk kegiatan sosialisasi

*Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021*

	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Kab. Lima Puluh Kota	Verivali data penerimaan bantuan jaminan kesehatan nasional dan verivali data PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD dan Sosialisasi	17.874 Jiwa PBI JKSS, 18.500 jiwa PBI Jamkesda dan 164.710 jiwa PBI JKN, 81 PSM dan 13 TKSK, 1 Sosialisasi	120,000,000.00	Kegiatan : Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Kab. Lima Puluh Kota	Verivali data penerimaan bantuan jaminan kesehatan nasional dan verivali data PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD dan Sosialisasi	17.874 Jiwa PBI JKSS, 18.500 jiwa PBI Jamkesda dan 164.710 jiwa PBI JKN, 81 PSM dan 13 TKSK, 1 Sosialisasi	125,000,000.00	Penambahan anggaran di hasil analisa kebutuhan untuk kegiatan Verivali penerima bantuan PBI JKSS, PBI JKN, PBI Jamkesmas dan PBI JKN APBD
	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/ Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sosialisasi	22.451 KPM BPMT ,16.717 KPM PKH	335,000,000.00	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/ Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sosialisasi	22.451 KPM BPMT ,16.717 KPM PKH	350,000,000.00	Penambahan anggaran di hasil analisa kebutuhan untuk kegiatan Monitoring Penyaluran BSP dan PKH
	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk TAGANA dan Masyarakat Rawan Bencana, Pendistribusian Bantuan untuk Korban Bencana, Terbinanya KSB, Forum Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal, Pembangunan Gudang Logistik	1 Sosialisasi, 13 Kecamatan, 1 KSB, 13 Forum Keserasian Sosial dan 2 Kearifan Lokal	135,000,000.00	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi untuk TAGANA dan Masyarakat Rawan Bencana, Pendistribusian Bantuan untuk Korban Bencana, Terbinanya KSB, Forum Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal dan Pembangunan Gudang Logistik	1 Sosialisasi, 13 Kecamatan, 1 KSB, 13 Forum Keserasian Sosial dan 2 Kearifan Lokal	635,000,000.00	Penambahan anggaran di hasil analisa kebutuhan untuk Pembangunan Gudang Penyimpanan barang bantuan dan tempat mobil rescue yang direncanakan berlokasi di Jorong Pulutan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau.
<b>07</b>	<b>Program Pembinaan Anak terlantar</b>		<b>Terwujudnya pembinaan terhadap anak terlantar</b>		<b>110,000,000.00</b>	<b>Program Pembinaan Anak terlantar</b>		<b>Terwujudnya pembinaan terhadap anak terlantar</b>		<b>150,000,000.00</b>	
	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan bantuan UEP serta pengiriman anak terlantar untuk mengikuti pelatihan	47 orang	103,000,000.00	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan bantuan UEP serta pengiriman anak terlantar untuk mengikuti pelatihan	50 orang	123,000,000.00	Penambahan anggaran di hasil analisa kebutuhan untuk kegiatan Pelatihan keterampilan untuk anak terlantar.
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah tenaga pembina anak terlantar yang mengikuti Bimbingan Tekhnis	27 orang	7,000,000.00	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah tenaga pembina anak terlantar yang mengikuti pelatihan	24 orang	27,000,000.00	Penambahan anggaran di hasil analisa kebutuhan untuk kegiatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar
<b>08</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>		<b>Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>		<b>365,000,000.00</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>		<b>Terwujudnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>		<b>365,000,000.00</b>	
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pelatihan keterampilan, pengiriman dan bantuan UEP bagi Penyandang disabilitas	36 orang	115,000,000.00	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pelatihan keterampilan, pengiriman dan bantuan UEP bagi Penyandang disabilitas	42 orang	115,000,000.00	



	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Truma	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bimtek dan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas.	116 orang	250,000,000.00	Kegiatan : Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Truma	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bimtek dan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas.	30 orang	250,000,000.00	
09	<b>Program : Pembinaan Panti asuhan / Panti Jompo</b>		<b>Terlaksananya Pembinaan Terhadap Panti Asuhan/ Jompo</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>Program : Pembinaan Panti asuhan / Panti Jompo</b>		<b>Terlaksananya Pembinaan Terhadap Panti Asuhan/ Jompo</b>		<b>5,000,000.00</b>	
	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan /jompo	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring dan evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota	9 Panti	5,000,000.00	Kegiatan : Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan /jompo	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Monitoring dan evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota	9 Panti	5,000,000.00	
10	<b>Program : Pembinaan Eks penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>		<b>Terlaksananya pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial</b>		<b>93,332,850.00</b>	<b>Program : Pembinaan Eks penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>		<b>Terlaksananya pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial</b>		<b>100,000,000.00</b>	
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP	20 orang	93,332,850.00	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP	20 orang	100,000,000.00	Penambahan anggaran di hasil analisa kebutuhan untuk kegiatan Eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP
11	<b>Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial</b>		<b>Terlaksananya Pemberdayaan terhadap kelembagaan kesejahteraan sosial</b>		<b>234,012,420.00</b>	<b>Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial</b>		<b>Terlaksananya Pemberdayaan terhadap kelembagaan kesejahteraan sosial</b>		<b>273,998,970.00</b>	
	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti sosialisasi dan lomba karang taruna tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	81 Karang Taruna	58,998,970.00	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti sosialisasi dan lomba karang taruna tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	81 Karang Taruna	58,998,970.00	
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengembangan model kelembagaan jaminan sosial	Posdaya, Dunia Usaha, LKKS, LK3 dan sosialisasi	55,013,450.00	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pengembangan model kelembagaan jaminan sosial	Posdaya, Dunia Usaha, LKKS, LK3 dan sosialisasi	65,000,000.00	Penambahan anggaran di hasil analisa kebutuhan untuk penambahan pemberian bantuan pada kegiatan Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan kejujuran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan 10 November	1 Kali Peringatan Hari Pahlawan dan Rehab Makam Pahawan	120,000,000.00	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan kejujuran	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peringatan Hari Pahlawan 10 November	1 Kali Peringatan	150,000,000.00	Penambahan anggaran di hasil analisa kebutuhan untuk penambahan rehab makam
			<b>Total</b>		<b>7,415,675,524.35</b>			<b>Total</b>		<b>8,186,329,224.35</b>	

*Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021*

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat. Mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Sosial berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2021, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan ada yang diarahkan secara khusus untuk Dinas Sosial. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Dinas Sosial harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Sosial dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2021 disajikan pada tabel II.5 berikut :

**Tabel II.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	Kab. Lima Puluh Kota	<b>Cakupan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial</b>		
	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin		Sosialisasi untuk Pengurus KUBE-FM, Sosialisasi untk KUBE-FM Penumbuhan, KUBE-FM Berkembang dan Pemberian Bantuan sosial Barang untuk KUBE FM	15 Kelompok KUBE	
	Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Jumlah WRSE dan KTK yang mengikuti Pelatihan, Keterampilan dan Pemberian Bantuan Sosial	60 Unit	
2	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Cakupan Kegiatan Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terhadap PMKS</b>		
	Kegiatan Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Kab. Lima Puluh Kota	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia tidak potensial, Pemberian bantuan UEP untuk Lansia Produktif	1.396 Orang	
3	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>		<b>Persentase Penyandang cacat dan Trauma yang dibina</b>		
	Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma		Bimtek untuk Penyandang Disabilitas Mental dan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	12 Orang	

Pada tabel II.5 usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2021 yaitu pada program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya berupa kegiatan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga Miskin dengan indikator kinerja berupa pemberian bantuan sosial barang yang diserahkan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM, besaran volumenya 15 Kelompok KUBE. Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu pelatihan dan pemberian bantuan sosial barang untuk Wanita Rawan sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Tindak Kekerasan (KTK), besaran/ volume sebanyak 60 unit. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial kegiatan pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia indikator kinerjanya pemberian bantuan permakanan lansia terlantar dan lansia tidak potensial dan pemberian bantuan UEP untuk Lansia Produktif. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma, indikator kinerja Bimbingan teknis untuk penyandang Disabilitas Mental dan Bantuan Alat Bantu bagi Peyandang Disabilitas.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 yaitu :

Visi :

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian  
Berlandaskan Gotong Royong “

Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Rangka Negara Kesatuan.

5 (lima ) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Presiden di RPJMN, ke lima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arahan utama RPJMN 2020-2024 untuk Dinas Sosial pada arahan pertama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), strategi pembangunan SDM adalah Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari :

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas anak, perempuan dan Pemuda.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial (Renstra Dinas Sosial) Tahun 2016-2021, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 yaitu :

**a. Pernyataan Visi**

**“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”**

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan.
2. Pelayanan adalah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

**b. Pernyataan Misi di susun sebagai berikut :**

1. Mewujudkan sumber daya manusia profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan stabilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
3. Meningkatkan profesionalisme sumber-sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan.

### c. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan :

- Terciptanya Pelayanan Prima terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
- Bantuan yang tersedia dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran

#### 2. Sasaran

- Meningkatnya SDM pelaku Pelayanan Sosial Baik di Tingkat Kabupaten Maupun di tingkat Kecamatan dan Menurunnya jumlah PMKS
- Jumlah KK Miskin yang mendapat bantuan, Jumlah Anak putus sekolah/ anak terlantar yang mendapat pelatihan dan Jumlah PSK yang tertangani dalam panti rehabilitasi
- Terbantunya masyarakat yang ditimpa bencana

#### Sasaran Program Urusan Sosial

- *Kemiskinan*, meliputi kelompok warga yang karena sesuatu hal baik karena faktor internal individu maupun faktor eksternal individu mengakibatkan ketidakmampuan sosial ekonomi atau rentan menjadi miskin yakni: (1) keluarga fakir miskin; (2) dan wanita rawan sosial ekonomi.
- *Keterlantaran*, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial yakni: (1) balita terlantar, (2) anak remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar.
- *Kecacatan*, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan sehingga terganggu fungsi sosialnya, yakni: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna rungu/wicara, (4) tuna grahita, dan (5) cacat ganda
- *Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku*, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (*social adjustment*) secara normatif, yakni: (1) tindak

tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkoba, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.

- *Keterasingan/keterpencilan dan/atau berada dalam lingkungan yang terisolasi*, yakni warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.
- *Akibat Bencana*, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, yakni: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
- *Korban Tindak Kekerasan* meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) lanjut usia korban tindak kekerasan, dan (4) pekerja migran korban tindak kekerasan.
- Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi: (1) Karang Taruna (2) PSM, (3)Panti Sosial,(4) Tagana (5) TKSK, (6) dunia usaha; (7) Saksi Peksos.

### **3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial**

Penetapan program dan kegiatan Dinas Sosial untuk Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2008, Permendagri No. 21 tahun 2011 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Sosial dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan sosial. Urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial meliputi Urusan Wajib yaitu Urusan Sosial. Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Sosial pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :



**Tabel 3.3.1**

**Program dan kegiatan yang ada pada Dinas Sosial**

<b>No</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional</li> <li>4. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>5. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor</li> <li>6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</li> <li>7. Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>8. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</li> <li>9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan</li> <li>10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan</li> <li>11. Penyediaan Makan dan Minum</li> <li>12. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> </ol>
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>2. Pengadaan Mobiler</li> <li>3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</li> <li>4. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor</li> </ol>
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan pakaian khusus hari –hari tertentu</li> </ol>
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li> <li>2. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>4. Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD</li> </ul>
JML	4 Program	21 Kegiatan

**Tabel 3.3.2**

**Program dan kegiatan Lingkup Urusan Sosial**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya</li> <li>2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin</li> <li>3. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>4. Identifikasi, Pendataan dan Penguatan Kapasitas</li> </ul>
2.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Peny. Cacat dan Lansia.</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS</li> <li>3. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS</li> <li>4. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</li> <li>5. Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</li> </ul>
3.	Pembinaan Anak terlantar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar</li> <li>2. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar</li> </ul>

4.	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma</li> <li>2. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma</li> </ol>
5.	Pembinaan Panti asuhan / Panti Jompo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan /jompo</li> </ol>
6.	Pembinaan Eks penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial</li> </ol>
7.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha</li> <li>2. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial</li> <li>3. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan kejuangan</li> </ol>
JML	7 Program	18 Kegiatan

Berdasarkan tabel diatas maka tahun 2021 Dinas Sosial melaksanakan 11 Program dengan 39 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dari pencapaian IKU, SDG'S, PUG dan SPM Dinas Sosial.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

4.1 Rencana Kinerja Dinas Sosial

Tabel IV.1  
Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2021	2022	
1	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	80	85	IKU
2	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	95	95	IKU
3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi	Nilai Akip	65	65	IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial ada 3 Sasaran yaitu Satu: Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri dengan Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri untuk Tahun 2021 targetnya 80 %. PMKS terdiri dari Lanjut Usia terlantar, Eks Narapidana, Disabilitas, Fakir Miskin, Kelompok Usaha Bersama, Anak Terlantar dan Putus Sekolah, Wanita Korban Tindak Kekerasan (KTK), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Korban Bencana. Dua : Meningkatkan Peran

Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada sasaran ini di targetkan 95 % untuk Tahun 2021 yang di Nilai Peran aktif semua PSKS yang ada. Tiga : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi, Indikator Nilai AKIP, target tahun 2021 65, nilai ini adalah nilai dari Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### Rencana Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021

Tabel IV.2

#### Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Indikator	Target		Ket
			2021	2022	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	
5.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	75 %	85 %	

6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase terhadap Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terhadap PMKS	75 %	85 %	
7.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Pembinaan terhadap Anak Terlantar	75 %	85 %	
8.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	75 %	85 %	
9.	Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Persentase Pembinaan terhadap Panti Asuhan/Jompo	75 %	85 %	
10.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Pembinaan terhadap Eks Penyandang Penyakit Sosial	75 %	85 %	
11.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase pemberdayaan terhadap Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	95 %	95 %	

Pada Tahun 2021 Program yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Sebanyak 11 Program. Target untuk urusan wajib 100 %, untuk urusan sosial pencapaian IKU yang berhubungan dengan PMKS sebanyak 75 % dan untuk urusan pencapaian IKU PSKS targetnya sebanyak 95 %. Program ini semua mendukung dari pencapaian target kinerja Dinas Sosial.

#### 4.2 Pendanaan

Untuk pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2021, berasal dari dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.3

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN  
2022  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Lembar 1 dari 18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		100 %	782,588,000.00			1,045,931,200.00	
0.00.00.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 bulan	8,000,000.00		12 bulan	15,000,000.00	
	Jumlah Materai dan Pengiriman Surat		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	8,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD	15,000,000.00	
0.00.00.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	48,588,000.00		12 bulan	60,780,000.00	
	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	48,588,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD	60,780,000.00	
0.00.00.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		12 bulan	20,000,000.00		12 bulan	22,000,000.00	
	Jumlah Kendaraan Roda 6, Roda 4 dan Roda 2 yang dibiayai Pembayaran Pajak dan Perizinan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	20,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD	22,000,000.00	
0.00.00.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		12 Kali	330,000,000.00		12 Kali	400,000,000.00	
	Jumlah Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	330,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD	400,000,000.00	

*Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021*



0.00.00.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Kebersihan Kantor		12 bulan	7,500,000.00			12 bulan	10,000,000.00
	Jumlah Alat Kebersihan yang diadakan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	7,500,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		10,000,000.00
0.00.00.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kerja		12 bulan	10,000,000.00			12 bulan	10,000,000.00
	Jumlah Servis Peralatan Kantor		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	10,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		10,000,000.00
0.00.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan		1 Paket	45,000,000.00			1 Paket	80,000,000.00
	Jumlah ATK yang diadakan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	45,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		80,000,000.00
0.00.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan	65,000,000.00			12 bulan	82,566,200.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Jumlah Spanduk, Bendera, Marawa, Jumlah Jenis Barang yang dicetak, Jumlah Lembar Penggandaan, Jumlah Penjilidan dan Jumlah Publikasi		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	65,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		82,566,200.00
0.00.00.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik yang diadakan		1 Paket	11,500,000.00			1 Paket	11,500,000.00
	Jumlah Alat Listrik yang diadakan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	11,500,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		11,500,000.00
0.00.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kali Pembayaran Bahan Bacaan		12 Kali	7,000,000.00			12 Kali	7,000,000.00
	Jumlah Kali Pembayaran Bahan Bacaan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	7,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		7,000,000.00
0.00.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat dan Tamu		12 bulan	55,000,000.00			12 bulan	82,000,000.00
	Jumlah Porsi Makan Minum Rapat dan Tamu yang disediakan		Kabupaten Lima Puluh Kota	2981 Porsi	55,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		82,000,000.00
0.00.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi		169 OH	175,000,000.00			169 OH	265,085,000.00
	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi		Kabupaten Lima Puluh Kota	160 OH	175,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		265,085,000.00
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	320,000,000.35				439,846,000.00
0.00.00.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia		1 Unit AC, 5 Unit	100,000,000.00			1 Unit AC, 5 Unit Laptop, 1 Unit Komputer dan 2 Unit Printer	161,346,000.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Lembar 53 dari 18

	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia		Kabupaten Lima Puluh Kota	20 Unit	100,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		161,346,000.00
0.00.00.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur		5 Unit Lemari	25,000,000.00			5 Unit Lemari Arsip, 1 unit Kursi Tamu	30,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Jumlah Pengadaan Mebeleur		Kabupaten Lima Puluh Kota	7 Unit	25,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		30,000,000.00
0.00.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa sopir dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional		264 hari dan 12 kali	120,000,000.35			264 hari dan 12 kali	148,500,000.00
	Jumlah Hari Kerja THL dan Jumlah Kali Perawatan Kendaraan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	120,000,000.35	APBDKAB	RUTIN OPD		148,500,000.00
0.00.00.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehap Gedung Kantor		1 Paket	75,000,000.00			1 Paket	100,000,000.00
	Jumlah Rehap Gedung Kantor		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Paket	75,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		100,000,000.00
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparaturnya		100 %	35,000,000.00				35,000,000.00
0.00.00.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu		70 stel	35,000,000.00			70 stel	35,000,000.00
	Jumlah Stel Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		Kabupaten Lima Puluh Kota	70 Stel	35,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		35,000,000.00
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	32,000,000.00				60,722,000.00
0.00.00.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen tentang Capaian dan Realisasi Kinerja , Pembuatan RENJA, LAKIP, LKJIP, Laporan Bulanan, laporan Evaluasi Tri Wulan, Monev Kegiatan		10 Dokumen	15,000,000.00			10 Dokumen	30,000,000.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Lembar 54 dari 18

	Jumlah Laporan tentang Capaian dan Realisasi Kinerja Pembuatan RENJA, LAKIP, LKJIP, LKPJ, Laporan Bulanan, Laporan Evaluasi Tri Wulan Dinas, Monev Kegiatan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Dokumen	15,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		30,000,000.00
<b>0.00.00.06.03</b>	<b>Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran</b>	<b>Jumlah Laporan Pronogsis Realisasi Anggaran dan Laporan Semester</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>3,500,000.00</b>			<b>1 Dokumen</b>	<b>7,861,000.00</b>
	Jumlah Laporan Pronogsis Realisasi Anggaran		Kabupaten Lima Puluh Kota	2 Dokumen	3,500,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		7,861,000.00
<b>0.00.00.06.04</b>	<b>Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</b>	<b>Jumlah Pelaporan Keuangan AKhir Tahun</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>3,500,000.00</b>			<b>1 Dokumen</b>	<b>7,861,000.00</b>
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	3,500,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		7,861,000.00
<b>0.00.00.06.06</b>	<b>Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan</b>	<b>Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>10,000,000.00</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>15,000,000.00</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD</b>								
	Jumlah OH yang melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBD		Kabupaten Lima Puluh Kota	182 OH	10,000,000.00	APBDKAB	RUTIN OPD		15,000,000.00
<b>1.01.06.15.</b>	<b>Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>Cakupan fakir miskin, komunitas adat tepencil (KAT) penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya yang diberdayakan</b>		<b>100 %</b>	<b>2,169,000,000.00</b>				<b>3,063,238,000.00</b>
<b>1.01.06.15.02</b>	<b>Peningkatan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya</b>	<b>Jumlah Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PSM, TKSK</b>		<b>81 Orang PSM dan 13</b>	<b>369,000,000.00</b>			<b>81 Orang PSM dan 13 Orang TKSK</b>	<b>596,738,000.00</b>
	Jumlah Pembinaan Peningkatan SDM Petugas dan PSKS serta Pemilihan Pilar-Pilar Sosial Berprestasi		Kabupaten Lima Puluh Kota	94 Orang	369,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		596,738,000.00

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 55 dari 18

1.01.06.15.03	Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Sosialisasi untuk Pengurus KUBE-FM dan Penumbuhan		2 Sosialisasi	850,000,000.00			2 Sosialisasi dan 15 Bantuan KUBE-FM	1,007,420,000.00
	Bantuan Kelompok Usaha Bersama dan Perorangan Fakir Miskin		Koto Bangun	1 Kelompok	20,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Pemberian Bantuan ke Kelompok Usaha Bersama ( KUBE )		Nagari Mungka	1 Orang	20,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi KUBE-FM dan Fakir Miskin		Kabupaten Lima Puluh Kota	20 Kelompok	400,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		1,007,420,000.00
	Sosialisasi Pengurus dan Anggota KUBE		Kabupaten Lima Puluh Kota	4 Kali	102,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pemberian Bantuan ke KUBE (untuk 3 KUBE)		Kec.Lareh Sago Halaban	3 Paket	60,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pemberian Bantuan ke Kelompok Usaha Bersama(KUBE)		Nagari Batu Balang	2 Kelompok	40,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pemberian Bantuan ke Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		Nagari Batu Balang	2 Orang	40,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pemberian Bantuan ke Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 1. Nagari Taeh Bukik 4 Kelompok 2. Nagari		KECAMATAN PAYAKUMBUH DAN HARAU	3 Kelompok	60,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Taeh Baruah 6 kelompok 3. Nagari Lubuak Batingkok 3 Kelompok 4. Nagari Simalanggang 4 Kelompok 5. Nagari Koto Baru Smlg 4 Kelompok 6. Nagari Koto Tangah Simalanggang 4 Kelompok 7. Nagari Piobang 3 Kelompok 8. Nagari Sei Beringin 3 Kelompok 9. Nagari Gurun 2 Kelompok 11. Nagari Bukik Limbuku 3 Kelompok								

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 56 dari 18

	Pemberian Bantuan ke KUBE		Kec. Mungka, kec. Guguak	2 Kelompok	40,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Jumlah UEP Fakir Miskin		Kabupaten Lima Puluh Kota	16 Paket	48,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2 Kelompok		nagari Mungo	1 Paket	20,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
<b>1.01.06.15.06</b>	<b>Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>	<b>Jumlah WRSE dan KTK yang mengikuti pelatihan dan keterampilan</b>		<b>25 KTK dan 25 WRSE</b>	<b>550,000,000.00</b>			<b>25 KTK dan 25 WRSE</b>	<b>763,601,000.00</b>
	Penyediaan Mesin Jahit Bagi Wanita Rawan Sosial		Kantor Wali Nagari Andaleh	10 Unit	30,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		Kabupaten Lima Puluh Kota	50 Orang	430,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		763,601,000.00
	Bantuan Mesin Jahit bagi Wanita Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi/WRSE		Kec. Lareh Sago Halaban	10 Unit	30,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Mesin Jahit bagi Wanita Korban Tindak Kekerasan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi/WRSE		Kec. Mungka, kec. Guguak	20 Orang	60,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
<b>1.01.06.15.07</b>	<b>Identifikasi Pendataan dan Penguatan Kapasitas</b>	<b>Verifikasi dan Validasi data BDT dan Bimtek Verivali BDT</b>		<b>13 Kecamatan</b>	<b>400,000,000.00</b>			<b>13 Kecamatan</b>	<b>695,479,000.00</b>
	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021, Bimtek petugas DTKS, Jumlah Baloho tentang Verivali DTKS, Jumlah terpasang stiker DTKS disetiap Rumah Tangga DTKS dan Jumlah Pendistribusian Buku		Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Nagari	400,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		695,479,000.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Lembar 57 dari 18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	DTKS								
1.01.06.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan kegiatan pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial terhadap PMKS		95 %	3,269,742,254.00				4,997,838,900.00
1.01.06.16.01	Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	1.280 orang lansia terlantar dan tidak potensial, 30 orang potensial/produktif		2.630 lansia	2,358,690,674.00			2.630 lansia terlantar tidak potensial	2,934,507,900.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial		Ateh Koto	25 Orang	18,750,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Alat Cacat Untuk Lansia Berupa Kursi Roda		Jorong Tengah Situjuh Batua	8 Orang	12,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	pemberian makanan tambahan balita dan lansia		Nagari Tanjung Pauh	25 Orang	18,750,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial		Nagari Kubang	30 Orang	22,500,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Pemakanan Bagi Lansia Terlantar dan Non Potensial		Nagari Pangkalan	37 Orang	27,750,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Pemakanan Lansia		Jorong Menara Agung, Jorong Beringin Indah, Jorong Simpang Ganti, Jorong Koto Ramai, Jorong Koto Baru	40 Orang	30,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Pokok untuk Lansia terlantar		Koto Bangun	40 Orang	30,000,000.00		IKU Daerah		0.00

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 58 dari 18

	Bantuan Pemakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial		Nagari Lubuak Alai	40 Orang	30,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Alat Cacat bagi Lansia - Kursi Roda		Nagari Lubuak Alai	3 Orang	4,500,000.00		IKU Daerah		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bantuan Alat Cacat bagi Lansia - Tongkat Kaki 4		Nagari Lubuak Alai	8 Orang	3,200,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan permakanan lansia terlantar dan lansia potensial		Kantor Wali Nagari Guguak VIII Koto	16 Orang	12,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Makanan Tambahan untuk Lansia		Jorong Ampang Gadang	40 Orang	30,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	bantuan permakanan lansia terlaantar dan lansia tidak potensional		Jopang Manganti	30 Orang	22,500,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Makanan bagi Lansia		Koto Lamo	25 Orang	18,750,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan lansia terlantar & lansia tidak potensial nagari gunuang malintang		Gunuang Malintang	50 Orang	37,500,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia tidak Potensial		Nagari Mungka	30 Orang	22,500,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Pemakanan Lansia		Lubuak Aua	40 Orang	30,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Pemakanan untuk fakir Miskin dan Lansia terlantar		Talang Anau	40 Orang	30,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Makanan kepada lansia		nagari koto tengah	40 Orang	30,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Jumlah Pemberian Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial		Kabupaten Lima Puluh Kota	779 Orang	1,091,740,674.00	APBDKAB	IKU Daerah		2,934,507,900.00



**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 59 dari 18

	Jumlah Bantuan UEP bagi Lansia Produktif/Potensial		Kabupaten Lima Puluh Kota	30 Orang	90,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia		Kabupaten Lima Puluh Kota	123 Orang	111,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Kursi Roda Lansia		Jrg. Ikan Banyak, Nagari Pandam Gadang	1 Unit	1,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan lansia terlantar dan lansia tidak potensial		KEC. MUNGKA	50 Orang	37,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan lansia terlantar dan lansia tidak potensial		BARUAH GUNUANG	50 Orang	37,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemberian Bantuan Makanan Bergizi baik bagi Lansia dan Jompo di Kecamatan Payakumbuh		Kecamatan Payakumbuh	65 Orang	48,750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia tidak Potensial		Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Luak dan Kec. Situjuh Limu Nagari	100 Orang	75,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan alat cacat untuk Lansia		Kec Lareh Sago Halaban dan Kec. Situjuh Limu Nagari	3 Orang	4,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Beras, minyak goreng, gula pasir, erengen sereal, kacang hijau, sarden, teh celup untuk Bantuan permakanan lansian terlantar dan lansia tidak potensial di Jorong tanah sirah nagari andiang kec. suliki		Jorong tanah sirah nagari andiang kec. suliki	30 Orang	22,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 60 dari 18

	Beras, minyak goreng, gula pasir, energen sereal, kacang hijau, sarden, teh celup untuk Bantuan permakanaan lansia terlantar dan lansia tidak potensial di Batang linjuang nagari tanjung bungo		Nagari Tanjung Bungo	30 Orang	22,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Nurana		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Khairul Amri		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/ n Helma		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Asnimar		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Dalius		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Liani		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Sainidar		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Kasnidar		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Nasrul		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Rosni		Jrg Koto Sarikat Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 61 dari 18

	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Anis		Jrg Tanjuang Barulak	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Asir		Jrg Tanjuang Barulak	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Damiasi		Jrg Tanjuang Barulak	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Masni		Jrg Tanjuang Barulak	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Ratinas		Jrg Tanjuang Barulak	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Kasiana		Jrg Tanjuang Barulak	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Rostiam		Jrg Tanjuang Barulak	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Tuti Suryati		Jrg Tanjuang Barulak	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Rosni		Jrg Tanjuang Barulak	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Syahrul		Jrg Tanjuang Barulak	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Syahrul		Jrg Siamang Bunyi Nagari	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Lembar 62 dari 18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Potensial a/n Dailimis		Kubang						
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Janimas		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Sina		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Aswarti		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Ratnawilis		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Johanis		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Samsuarna		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Rosna		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Jasma		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Damis		Jrg Siamang Bunyi Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	"Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia tidak Potensial"		Nag. Batu Payuang	60 Orang	45,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	"Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia tidak Potensial"		Nag. Andaleh	70 Orang	52,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 63 dari 18

	Bantuan Pemakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial		nagari batu balang	70 Orang	52,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Pemakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial		nagari bukit limbuku	15 Orang	11,250,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Pemakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial		Nagari Pilubang	25 Orang	18,750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bantuan Alat Cacat untuk Lansia		kabupaten Lima Puluh Kota	5 Orang	7,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan alat cacat untuk Lansia		Kec. Lareh Sago Halaban, Kec. Luak, Kec. Situjuh Limo nagari	1 Orang	1,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia		Kecamatan Harau	50 Orang	37,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Rohana		Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Asma		Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Nurhayani		Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Fahmi		Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Domsani		Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Nailis		Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 64 dari 18

	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Kamsani		Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Darawi		Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Rosmainar		Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Hazri Zam		Jrg Taratak Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Nuraini		Jorong Limo Koto Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Nuraini		Jorong Limo Koto Nagari	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Potensial a/n Juraisani		Kubang						
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Yumnalis		Jorong Limo Koto Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Asma		Jorong Limo Koto Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Wardati		Jorong Limo Koto Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Roslaini		Jorong Limo Koto Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Hasan Basri		Jorong Limo Koto Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 65 dari 18

	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Alianus		Jorong Limo Koto Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Almiaris		Jorong Limo Koto Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Nurianis		Jorong Limo Koto Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Sofyan		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Murni		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Kudri		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Dahliam		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Rosna		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Risman		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Yusran		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Zulfa		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Rosmi		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Lembar 66 dari 18

	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Yuhelmi		Jrg Koto Baru Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Rosmanidar		Jrg Kubang Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Yusnidar		Jrg Kubang Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	Prioritas Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Rahmayulis		Jrg Kubang Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Ihsan		Jrg Kubang Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Erniati		Jrg Kubang Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Hasna		Jrg Kubang Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial Nurhayani		Jrg Kubang Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Desni		Jrg Kubang Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Nurhayati		Jrg Kubang Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial a/n Sulaini		Jrg Kubang Nagari Kubang	1 Paket	750,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Permakanan Lansia		Kecamatan Kapur IX	100 Orang	75,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00



NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Lembar 67 dari 18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bantuan pengadaan kursi roda		Kecamatan kpr IX dan Pangkalan	5 Orang	7,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan tongkat 3 kaki		Kecamatan kpr IX dan Pangkalan	5 Orang	1,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	bantuan permakanan lansia terlantar dan lansia tidak potensial		jorong tanah siarah nagari andiang	30 Paket	22,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
<b>1.01.06.16.07</b>	<b>Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS</b>	<b>1 Sosialisasi dan 15 RTLH</b>		<b>290 PSKS, 39 Unit</b>	<b>321,051,580.00</b>			<b>290 PSKS, 39 Unit RUTILAHU</b>	<b>401,475,000.00</b>
	Terlaksananya Sosialisasi RTLH, Sosialisasi tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosialisasi Peningkatan Peran PSM dalam menunjang Kegiatan RTLH		Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Sosialisasi	96,051,580.00	APBDKAB	IKU Daerah		401,475,000.00
	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana PMKS		Kabupaten Lima Puluh Kota	15 RTM	225,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		
<b>1.01.06.16.08</b>	<b>Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>	<b>17.874 Data PBI JKSS, 3202JAMKESDA dan 164.710 Data PBI JKN, 13 TKSK dan 81 PSM</b>		<b>17.874 Data PBI JKSS</b>	<b>120,000,000.00</b>			<b>17.874 Data PBI JKSS dan 162.721 Data PBI JKN APBN, 1.702 PBI APBD Lima Puluh Kota</b>	<b>181,122,000.00</b>
	Verivali Data Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional dan Verivali Data PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD		Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	120,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		181,122,000.00
	Sosialisasi Verivali Data PBI JK		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Kegiatan	0.00	APBDKAB	IKU OPD		

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Lembar 68 dari 18

1.01.06.16.09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial	22.451 KPM BPMT, 17.662 KPM PKH		22.451 KPM Rastra/BP	335,000,000.00			22.451 KPM Rastra/BPNT, 8.086 Peserta KPM	615,309,000.00
	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Program (BSP) / Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH)		Kabupaten Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	310,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		615,309,000.00
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Sosialisasi Program Sembako		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Sosialisasi	25,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
1.01.06.16.10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	13 Kecamatan, 36 Orang Anggota TAGANA dan anggota KSB, 9 Forum dan 1 KSB		13 Kecamatan	135,000,000.00			13 Kecamatan, 30 Orang anggota TAGANA, 13 Forum Keserasian Sosial, 1 Desa Berketahanan, 2 Kearifan Lokal	865,425,000.00
	Jumlah Pendistribusian Bantuan, Perekrutan Anggota TAGANA , Bimtek Peningkatan Kemampuan Anggota TAGANA dan Anggota KSB serta Pembinaan Terhadap Daerah Rawan Konflik		Kabupaten Lima Puluh Kota	80 Nagari	135,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		865,425,000.00
1.01.06.17.	Program pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang dibina		95 %	110,000,000.00				309,755,500.00
1.01.06.17.02	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah alah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan keterampilan		47 Orang	103,000,000.00			50 Orang	222,785,500.00

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 69 dari 18

	Jumlah anak terlantar dan anak putus sekolah serta anak membutuhkan perlakuan khusus (AMPK)		Kabupaten Lima Puluh Kota	17 Orang	58,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		222,785,500.00
	Jumlah Kesos Anak Terlantar yang Mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja		Kabupaten Lima Puluh Kota	15 Orang	45,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		
<b>1.01.06.17.05</b>	<b>Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar</b>	<b>Jumlah tenaga pembina anak terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis</b>		<b>27 Orang</b>	<b>7,000,000.00</b>			<b>27 Orang</b>	<b>86,970,000.00</b>
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis bagi Tenaga Pembina Anak Terlantar		Kabupaten Lima Puluh Kota	27 Orang	7,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		86,970,000.00
	Jumlah Peserta Study Komparatif bagi Pembina Anak Terlantar dalam Panti Sosial		Kabupaten Lima Puluh Kota	0 Orang	0.00	APBDKAB	IKU OPD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>1.01.06.18.</b>	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	<b>Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina</b>		<b>95 %</b>	<b>365,000,000.00</b>				<b>611,219,000.00</b>
<b>1.01.06.18.03</b>	<b>Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma</b>	<b>Jumlah Pelatihan Keterampilan , Pengiriman dan bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas</b>		<b>36 Orang</b>	<b>115,000,000.00</b>			<b>40 %</b>	<b>252,669,000.00</b>
	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikuti Pelatihan dan diberikan Bantuan Tolkit Pasca Pelatihan		Kabupaten Lima Puluh Kota	10 Orang	25,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		252,669,000.00
	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Pnati Rehabilitasi		Kabupaten Lima Puluh Kota	16 Orang	60,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		
	Jumlah Pemberian Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas		Kabupaten Lima Puluh Kota	10 Orang	30,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		
<b>1.01.06.18.04</b>	<b>Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma</b>	<b>Jumlah Bimtek dan Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas</b>		<b>116 orang</b>	<b>250,000,000.00</b>			<b>116 Orang</b>	<b>358,550,000.00</b>
	Bantuan Alat dengar ke seluruh masyarakat koto tinggi yang membutuhkan		Koto Tinggi	4 Orang	2,000,000.00		IKU Daerah		0.00

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 70 dari 18

	Bantuan Penyandang Disabilitas		Nagari Halaban	4 Orang	6,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Bantuan Alat Bantu Cacat Bagi Penyandang Disabilitas		Jorong Sarilamak	2 Orang	3,000,000.00		IKU Daerah		0.00
	Jumlah Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Mental (UILS) dan Jumlah Bantuan Alat Bantu Cacat bagi Penyandang Disabilitas		Kabupaten Lima Puluh Kota	116 Orang	220,000,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		358,550,000.00
	Bantuan Alat Bantu Cacat bagi Penyandang Disabilitas		kab.limapuluh kota	5 Orang	7,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
	Bantuan Alat Bantu Cacat bagi Penyandang disabilitas, alat bantu dengar dll 1. Kecamatan Payakumbuh 25 Orang 2. Kecamatan Harau 25 Orang		KECAMATAN PAYAKUMBUH DAN HARAU	15 Orang	11,500,000.00	APBDKAB	IKU Daerah		0.00
1.01.06.19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Panti Asuhan/Panti Jompo yang dibina		95 %	5,000,000.00				8,390,000.00
1.01.06.19.03	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota		9 Panti	5,000,000.00			9 Panti	8,390,000.00
	Monitoring dan Evaluasi terhadap Panti Sosial yang ada		Kabupaten Lima Puluh Kota	9 Panti	5,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		8,390,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	di Kabupaten Lima Puluh Kota								
1.01.06.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina		95 %	93,332,850.00				140,345,000.00
1.01.06.20.01	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial		20 Orang	93,332,850.00			20 Orang	140,345,000.00

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

Lembar 71 dari 18

	Jumlah Peserta Bimtek bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Pemberian Bantuan UEP bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial		Kabupaten Lima Puluh Kota	20 Orang	93,332,850.00	APBDKAB	IKU OPD		140,345,000.00
<b>1.01.06.21.</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan</b>		<b>95 %</b>	<b>234,012,420.00</b>				<b>738,045,000.00</b>
<b>1.01.06.21.01</b>	<b>Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha</b>	<b>Jumlah Dunia Usaha dan Karang Taruna yang mendapatkan pemberdayaan dan pembinaan</b>		<b>15 Dunia Usaha dan</b>	<b>58,998,970.00</b>			<b>15 Dunia Usaha dan 79 Karang Taruna</b>	<b>140,380,000.00</b>
	Jumlah Karang Taruna yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota		Kabupaten Lima Puluh Kota	80 Kelompok	58,998,970.00	APBDKAB	IKU OPD		140,380,000.00
<b>1.01.06.21.04</b>	<b>Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial</b>	<b>Jumlah Pengembangan Model Kelembagaan Jaminan Sosial</b>		<b>41 Posdaya Dunia</b>	<b>55,013,450.00</b>			<b>15 Posdaya/LKKS , 30 Klaen LK3, 9 Panti Sosial</b>	<b>282,490,000.00</b>
	Jumlah LKKS yang mengikuti rapat, Sosialisasi penguatan pengurus posdaya dan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat		Kabupaten Lima Puluh Kota	41 Lembaga	55,013,450.00	APBDKAB	IKU OPD		282,490,000.00
<b>1.01.06.21.11</b>	<b>Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejujuran</b>	<b>Jumlah Peringatan Hari Pahlawan 10 November</b>		<b>1 Kali Peringatan</b>	<b>120,000,000.00</b>			<b>1 Kali Peringatan Hari Pahlawan dan Rehap Makam Pahlawan</b>	<b>315,175,000.00</b>

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Lembar 72 dari 18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Peringatan Hari Pahlawan 10 November		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Kegiatan	72,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		315,175,000.00
	Rehabilitasi Tempat dan Gedung Makam Pahlawan		Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Paket	48,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
<b>Total</b>						7,415,675,524.35			<b>11,450,330,600.00</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022												
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target									
1																						
1	06																				0	
1	06	01																			0	
1	06	01	2.01																		0	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Renstra dan Renja	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	80 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							0	
1	06	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah RKA dan DPA	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	80 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							0	
1	06	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tahunan, SAKIP, LKJIP, Lap. Kegiatan	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	80 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							0	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Perikanan	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	80 %		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							0	
1	06	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OH yang melaksanakan Evaluasi dan monitoring Kegiatan APBD	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 OH	80 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum							11,500,000	
1	06	01	2.02																		0	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	3,528,487,167	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								4,057,760,242
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0									0
1	06	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SPJ kegiatan untuk verifikasi	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum								0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya bahan bahan untuk tanggapan pemeriksaan keuangan	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan tentang Capaian & Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			17,250,000	
1.06.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ semesteran	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4,025,000	
1.06.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			4,025,000	
<b>1.06.01.2.03</b>	<b>Administrasi Umum</b>								<b>1,102,588,000</b>				<b>0</b>	
1.06.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			9,200,000	
1.06.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	48,588,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			55,876,200	
1.06.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.01.2.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya.	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			23,000,000	
1.06.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah hari kerja THL yang Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2976 Hari 12 Bulan	100 %	330,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			379,500,000	
1.06.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			8,625,000	
1.06.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata perbaikan peralatan kantor yang dilakukan dalam satu tahun	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			11,500,000	
1.06.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			51,750,000	
1.06.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			74,750,000	
1.06.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah alat listrik yang diadakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	11,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			13,225,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat - alat Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pembayaran bahan bacaan dan surat kabar	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			8,050,000	
1.06.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2000 Porsi	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			63,250,000	
1.06.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	115 OH	100 %	175,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			201,250,000	
1.06.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Buah	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			115,000,000	
1.06.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Mobiler	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			28,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas operasional Jumlah hari kerja THL yang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 264 Hari	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			138,000,000	
1.06.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			86,250,000	
1.06.01.2.03.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
<b>1.06.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								<b>35,000,000</b>				<b>0</b>	
1.06.01.2.04.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 Stel	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 Stel	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Kopri	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Stel	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah stel pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 Stel	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			40,250,000	
1.06.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OH yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 OH	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OH yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 OH	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OH yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 OH	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>								<b>2,197,342,024</b>				<b>0</b>	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>2,197,342,024</b>				<b>0</b>	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan pemilihan pilar- pilar berprestasi	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	81 PSM	95 %	219,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			251,850,000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TSKS dan pemilihan pilar- pilar berprestasi	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	13 TSKS	95 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			172,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Belanja Bantuan Sosial Jumlah sarana dan prasarana PMKS Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dan RTLH	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	181 Orang 15 RTLH 2 Sosialisasi	95 %	864,329,604	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			993,979,045	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah Karang Taruna yang mengikuti sosialisasi dan Lomba Karang taruna Jumlah Pembentukan, Pemberian Bantuan UEP Monitoring dan Evaluasi terhadap KUBE-FM Penumbuhan dan Pengembangan	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	81 Kelompok 35 Kelompok 2 Sosialisasi	95 %	908,998,970	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1,045,348,815	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial penyerahan bantuan untuk masyarakat	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Sosialisasi LKKS LK3 10 Orang	95 %	55,013,450	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			63,265,467	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>								<b>3,379,023,524</b>				<b>0</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>								<b>2,723,690,674</b>				<b>0</b>	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bantuan Permakanan Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP Bagi Lansia	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	2165 Orang 30 Orang	75 %	2,273,690,674	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2,614,744,275	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan disabilitas terlantar	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	0 Orang	75 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemberian Alat Bantu cacat bagi Lansia	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	90 Orang	75 %	85,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			97,750,000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasik Keluarga	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	0 Orang	75 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	45 Orang	75 %	253,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			290,950,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	0 Orang	75 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.04.2.01.13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	16 Orang	75 %	112,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			128,800,000	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>								<b>655,332,850</b>				<b>0</b>	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP	Jumlah Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	20 Orang	75 %	93,332,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			107,332,777	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	25 Orang 25 Orang	75 %	550,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			632,500,000	
1.06.04.2.02.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	9 Panti 27 Orang	75 %	12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			13,800,000	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>								<b>958,000,000</b>				<b>0</b>	
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>								<b>103,000,000</b>				<b>0</b>	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase jumlah penerima perlindungan dan jaminan Sosial	Pelatihan Bagi Anak Terlantar /Putus Sekolah Pengiriman Anak Ke Panti Sosial Rehabilitasi	Jumlah Pemeliharaan Anak Terlantar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	15 Orang 12 Orang	75 %	103,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			118,450,000	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase jumlah penerima perlindungan dan jaminan Sosial	Jumlah Rujukan Anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak Terlantar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	0 Orang	75 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase jumlah penerima perlindungan dan jaminan Sosial	Jumlah Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak Terlantar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	0 Orang	75 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>855,000,000</b>				<b>0</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penerima perlindungan dan jaminan Sosial	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	13 Kecamatan	75 %	400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			460,000,000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penerima perlindungan dan jaminan Sosial	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Sembako Monitoring Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Sosialisasi Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI Jamkesda Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKN APBD Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	22451 KPM 16717 KPM 2 Sosialisasi 18500 Jiwa 164710 Jiwa 17874 Jiwa	75 %	455,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			523,250,000	
<b>1.06.06</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>						<b>135,000,000</b>				<b>0</b>	
<b>1.06.06</b>		2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>						<b>62,000,000</b>				<b>0</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Penyediaan Makanan	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	1 Paket	75 %	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			46,000,000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Penyediaan Sandang	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	0 Paket	75 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	0 Paket	75 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	6 Orang	75 %	11,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12,650,000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Penggantian Transportasi Tagana	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	128 Orang	75 %	11,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			12,650,000	
<b>1.06.06</b>		2.02	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>						<b>73,000,000</b>				<b>0</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

**Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL**

**Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06.00 DINAS SOSIAL**

Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan		
Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian
				Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan					
Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan kampung Siaga Bencana	Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	0 Orang	75 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah Sosialisasi untuk Tagana dan Masyarakat rawan Bencana	Terbentuknya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	25 Orang	75 %	73,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
<b>TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>							<b>120,000,000</b>				
<b>Taman Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>							<b>120,000,000</b>				
Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik	Jumlah Rehab Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan Peringatan Hari Pahlawan 10 November	Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Rehab 1 Kali Peringatan	95 %	88,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik	Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan	Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	1 Paket	95 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			
Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik	Jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	Jumlah Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	528 Hari	95 %	32,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2021 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat Kabupaten sampai pada Musrenbang Tingkat Propinsi dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial juga tidak terlepas dari Renstra Dinas Sosial Tahun 2016 s/d 2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama 5 Tahun sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya serta dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renja Dinas Sosial ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Sosial, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Sosial juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Sosial dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Sosial pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.



Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**HARMEN, SH**  
Pembina Utama Muda/ IV/c  
NIP. 19670816 199308 1 001